

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada tanggal 18 Agustus 2022 sudah di tetapkan bahwa ibu kota negara berada di Kalimantan Timur, hal ini berarti Kalimantan Timur perlu berbenah diri untuk meningkatkan daya saing warganya di tingkat nasional, sehingga tidak tergesur oleh pendatang yang mencari pekerjaan di sektor industri dan perdagangan. Pemerintah juga perlu meningkatkan PDRB agar pembangunan di Kalimantan Timur dapat di optimalkan dan pemerintah harus meningkatkan program penyerapan tenaga kerja produktif untuk menurunkan Tingkat Kemiskinan yang ada. Pemerintah juga diharapkan mampu meningkatkan PDRB dan IPM melalui faktor-faktor pendukung guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Bagaimana hubungan variabel dependen Tingkat Kemiskinan dan hubungan variabel independen seperti Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk .

1. Hubungan Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat Kemiskinan
 - a. Jika wilayah memiliki PDRB yang tinggi akan mengurangi Tingkat Kemiskinan, karena dengan tingginya PDRB pembangunan dapat dioptimalkan, sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat.
 - b. Jika wilayah memiliki PDRB yang rendah akan menimbulkan bertambahnya Tingkat Kemiskinan karena kurangnya pembangunan yang optimal untuk mengurangi masyarakat miskin.

2. Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan
 - a. Rendahnya IPM akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan akan menimbulkan Tingkat Kemiskinan bertambah.
 - b. Tingginya IPM akan menimbulkan kemakmuran dan produktivitas masyarakat, sehingga akan meningkatnya perolehan pendapatan. Hal ini berarti jika IPM tinggi akan mengurangi Tingkat Kemiskinan.
3. Hubungan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan
 - a. Pertumbuhan jumlah penduduk berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan, karena setiap tahun akan bertambahnya jumlah penduduk yang akan menimbulkan ketimpangan sosial, dan kurangnya untuk memenuhi hasil-hasil produksi yang akan menyebabkan penduduk sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga akan berakibat bertambahnya Tingkat Kemiskinan.

2.1 Kemiskinan

Kemiskinan dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni aspek kebutuhan hidup yang layak, aspek penghasilan, aspek kesempatan atau opportunity, aspek keadaan atau kondisi, dan aspek penguasaan terhadap sumber-sumber pendapatan (Todaro 2003). Kemiskinan berdasarkan aspek kebutuhan hidup yang layak adalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok yang disebabkan adanya kekurangan barang dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan hidup standar yang layak. Ini

merupakan kemiskinan absolut/mutlak yakni tidak terpenuhinya standar kebutuhan dasar.

Kemiskinan berdasarkan aspek kesempatan atau *opportunity* adalah kemiskinan yang terjadi karena ketidaksamaan kesempatan untuk mendapatkan kesempatan sosial seperti keterampilan yang memadai, informasi yang berguna, jaringan sosial, dan sumber modal. Kemiskinan dari aspek keadaan atau kondisi dilihat sebagai suatu keadaan yang dicirikan dengan kondisi kurang makan dan gizi, kekurangan pakaian, perumahan tidak memadai, pendidikan yang rendah, dan sedikitnya kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan. Kemiskinan berdasarkan aspek penguasaan terhadap sumber-sumber pendapatan merupakan keterlantaran yang disebabkan oleh ketidakmerataan distribusi pendapatan.

Sudantoko dan Hamdani (2009) menjelaskan berbagai definisinya tentang kemiskinan. Kemiskinan terbagi-bagi menjadi kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, kemiskinan struktural, kemiskinan dengan pendekatan pendapatan/pengeluaran, kemiskinan dengan pendekatan rata-rata per kapita, dan kemiskinan dengan pendekatan BKKBN. Kemiskinan relatif merupakan kondisi masyarakat karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Ukuran finansial dalam bentuk uang merupakan

terjemahan dari kebutuhan pokok minimum. Istilah garis kemiskinan diartikan sebagai nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar sedangkan penduduk miskin ialah penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi struktur, dimana kemiskinan menggejala oleh sebab tatanan sosial yang tak adil. Tatanan yang tak adil ini menyebabkan banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang dan/atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga mereka yang malang dan terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil ini menjadi serba berkekurangan, tak setara dengan tuntutan untuk hidup yang layak dan bermartabat sebagai manusia. Salah satu contoh adalah kemiskinan karena lokasi tempat tinggal yang terisolasi, misalnya, orang Mentawai di Kepulauan Mentawai, orang Melayu di Pulau Christmas, dan sebagainya.

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Contohnya adalah kemiskinan yang terjadi pada suku-suku terasing, seperti suku Badui di Cibeo Banten Selatan, suku Dayak di pedalaman Kalimantan, dan suku Kubu di Jambi. Kemiskinan dengan pendekatan pendapatan/pengeluaran menggunakan konsep kebutuhan dasar yang di dalamnya terdapat komponen kebutuhan dasar dan karakteristik kebutuhan dasar serta hubungan keduanya dengan kemiskinan.

Kemiskinan dengan pendekatan rata-rata per kapita dari waktu ke waktu mengalami perkembangan dalam penerapannya. Tingkat konsumsi menurut golongan umur dan jenis kelamin serta skala ekonomi dalam konsumsi biasanya belum termasuk dalam pertimbangan pada pendekatan rata-rata per kapita ini.

Menurut Kuncoro (2003) penyebab kemiskinan dipandang dari segi ekonomi. Pertama secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga teori ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*).

2.1.1. Indikator Kemiskinan

Indikator atau ukuran tingkat kemiskinan yang disajikan oleh BPS adalah persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (*head count index* - P_0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (*poverty gap index* - P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*poverty severity index* - P_2). *Head Count Index* (P_0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah GK. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh

ratarata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin (Haughton dan Khandker 2009).

2.1.2. Ukuran Kemiskinan

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Ukuran kemiskinan dapat dilihat dari Garis Kemiskinan (GK), Head Count Index (HCI-P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Sudantoko dan Hamdani 2009).

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. *Head Count Index* (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). Tingkat kemiskinan dinyatakan dengan *Head Count Index* (HCI-P0).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran

penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan seluruh nilai uang dari barang dan jasa akhir (*final product*) yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam suatu tahun tertentu (Suparmoko 2016). PDRB digunakan untuk berbagai tujuan, salah satunya sebagai alat ukur kinerja perekonomian secara agregat. Perekonomian dapat dikatakan tumbuh jika terdapat presentasi kenaikan pendapatan riil pada suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan pendapatan riil pada tahun sebelumnya (Sukirno 2004). Menurut Setyarko (2018) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah seluruh nilai tambah (*added value*) yang diciptakan oleh suatu perekonomian dalam suatu negara yang dihitung untuk masa satu tahun. Nilai tambah ini merupakan selisih antara seluruh nilai produksi dengan seluruh biaya input antara (*intermediate inputs*) Dengan kata lain nilai tambah itu mencerminkan balas jasa atau pendapatan dari setiap pemilik faktor produksi. Jadi dengan mengetahui tinggi rendahnya nilai tambah atau PDRB suatu daerah, kita dapat mengetahui kemajuan suatu perekonomian daerah yang bersangkutan.

Terdapat tiga pendekatan yang digunakan untuk menghitung angka-angka PDRB (Maulia 2014) yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pendekatan produksi adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang

dihasilkan oleh unit-unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya dalam satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor), antara lain: 1. Pertanian; 2. Pertambangan dan penggalian; 4. Listrik, gas dan air bersih; 5. Konstruksi; 6. Perdagangan, hotel dan restoran; 7. Pengangkutan; 8. Keuangan, Real Estat dan jasa perusahaan; 9. Jasa-jasa. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub sektor.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pendekatan pendapatan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi pada jangka waktu tertentu (dalam satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Semuanya belum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. PDRB dalam pendekatan ini mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan pendekatan pengeluaran adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, 2. Pengeluaran konsumsi pemerintah, 3. 14 Pembentukan modal tetap domestik bruto, 4. Perubahan inventori, 5. Ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang akan dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto

Perhitungan PDRB memiliki tujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan atau perencanaan dan mengevaluasi hasil pembangunan yang memuat informasi mengenai gambaran dalam kinerja perekonomian daerah (Nabawi, 2020). Made, dkk (2016) mengungkapkan beberapa metode penghitungan PDRB yang dapat dipakai, yaitu:

- 1) Metode Langsung, metode ini sepenuhnya didasarkan oleh data daerah dan hasil hitungnya mencakup seluruh produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu daerah
- 2) Metode Tidak Langsung, metode ini dilakukan untuk menghitung nilai tambah suatu kelompok ekonomi dengan menempatkan nilai tambah nasional ke dalam tiap kelompok kegiatan ekonomi pada tingkat regional.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Hasil PDRB yang menyebar di setiap golongan masyarakat termasuk di golongan penduduk miskin merupakan syarat bagi pengurangan penduduk miskin. (Siregar dan Wahyuniarti 2008).

2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pengukuran pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990. UNDP memperkenalkan IPM sebagai indikator untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

IPM mengukur daerah dengan skala nol (tingkat pembangunan manusia yang paling rendah) hingga seratus (tingkat pembangunan manusia yang tertinggi)

berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak. IPM memeringkat daerah menjadi tiga kelompok: tingkat pembangunan yang rendah (0.0 hingga 49.9), tingkat pembangunan manusia menengah (50.0 hingga 79.9) dan tingkat pembangunan manusia tinggi (80.0 hingga 100).

Tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar Indeks Pembangunan Manusia suatu daerah adalah :

1. Tingkat kesehatan diukur dengan angka harapan hidup saat lahir.
2. Tingkat pendidikan diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.
3. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

2.3.1 Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yang digunakan sebagai indikator yaitu (i) bidang kesehatan : usia hidup (logetivity) ; (ii) bidang pendidikan : pengetahuan (knowledge) ; dan (iii) bidang ekonomi : standar hidup layak (decent living) (Ezkirianto dan Findi 2013).

1. Usia hidup. Sejauh ini ada tiga macam data yang dapat digunakan untuk memperoleh dua macam data dasar tersebut yaitu Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), dan Ssurvei Sosial Ekonomi

Nasional (Susenas). Periodisasi SP dan Supas adalah 10 tahunan, sedangkan periodisasi adalah tahunan.

2. Pengetahuan. Perhitungan rata-rata lama sekolah dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal dihitung lama sekolah untuk masing-masing individu dengan menggunakan pola hubungan antar variabel-variabel tersebut. Pada tahap berikutnya dihitung rata-rata lama sekolah agregat.
3. Standar hidup layak. Indikator standar hidup layak diakui sebagai indikator input, bukan indikator dampak, sehingga sebenarnya kurang sesuai sebagai unsur IPM. Untuk keperluan perhitungan IPM provinsi atau kabupaten/kodya data dasar PDRB perkapita tidak dapat digunakan untuk mengukur standar hidup layak karena bukan ukuran yang peka untuk mengukur data beli 9 penduduk (yang merupakan fokus IPM). Sebagai penggantinya digunakan konsumsi per kapita riil yang telah disesuaikan untuk keperluan yang sama

2.3.2 Tujuan dan Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Menurut (1995), tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada empat hal penting yang harus diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan. Empat hal pokok tersebut memuat pijakan- pijakan yang dijelaskan secara singkat sebagai berikut: 1) Produktivitas; 2) Pemerataan; 3) Kesinambungan; 4) Pemberdayaan.

Adapun manfaat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu : Mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), Menentukan peringkat atau level pembangunan suatu

wilayah/Negara, Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

2.4 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk dapat diartikan sebagai kumpulan WNI ataupun WNA yang memutuskan menetap dan bertempat tinggal di suatu wilayah dalam yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2012). Karena penelitian ini difokuskan pada wilayah Provinsi Kalimantan Timur, maka untuk jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur.

2.5 Studi Terkait

Penelitian yang dilakukan oleh Cholili dan Pudjiharjo (2014) yang bertujuan untuk melihat bagaimana tiga variabel independen berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia, dengan variabel independen adalah indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto, dan pengangguran baik secara simultan maupun secara parsial. Teori kemiskinan, pertumbuhan PDRB dan IPM dengan model Ordinary Least Square (OLS) digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian memperlihatkan adanya pengaruh secara simultan dari ketiga variabel independen dengan koefisien determinan 0.743 (R-Square). Namun ketika diuji secara parsial PDRB tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan IPM dan pengangguran secara parsial mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Suhandi dkk (2018) yang bertujuan untuk menggambarkan pengembangan pengaruh populasi pada jumlah kemiskinan di kota Palembang dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Tidak ada penghitungan yang akurat yang telah dibuat untuk menentukan jumlah orang miskin di Indonesia, selalu muncul kontroversi karena setiap penghitungan memiliki kriteria tersendiri. Perbedaan ini didasarkan pada faktor penyebab yang berdampak pada implikasi politik. Penyebab kemiskinan, umumnya adalah bahwa orang-orang miskin tidak memiliki kapasitas untuk memasuki sumber ekonomi. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier sederhana, tingkat populasi (X) dan kemiskinan (Y) di kota Palembang tahun 2010-2015. Dari data disimpulkan bahwa variabel jumlah populasi (X) memiliki pengaruh negatif pada variabel jumlah kemiskinan di kota Palembang. Secara simultan, jumlah populasi memiliki pengaruh pada jumlah kemiskinan di kota Palembang yaitu 0,398%, sedangkan -14,045% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel diluar studi ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Panggabean dan Matondang (2019) yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh belanja pemerintah daerah, terhadap sumber daya manusia, indeks pembangunan dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dan teknik analisis dalam penelitian ini adalah regresi data panel menggunakan Eviews 10 menggunakan dengan metode Least Square Panel (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia

(IPM) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kemiskinan ($p = < 0,05$)

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Fadila dan Marwan (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2013-2018”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2013-2018. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang mana data panel ini merupakan penggabungan dari data *Time Series* dan *Cross Section*. Dalam Penelitian ini Sumber data di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat 2013-2018. Hasil dari penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat 2013-2018.